



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

PERENCANAAN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA MANDALAHAYU KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

Farid Hernawan

Program Magister Ilmu Administrasi Negara

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

faridhermawan2s@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 menjadi latar belakang penting, didukung oleh tiga pilar utama: komitmen pemerintah, konvergensi program, dan pemantauan-evaluasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data di Desa Mandalahayu menunjukkan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan belum optimal, ditandai dengan ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya inisiatif kerja sama, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perbedaan signifikan antara rencana dan realisasi program. Penelitian ini menggunakan pendekatan perencanaan strategis yang komprehensif, mencakup penetapan visi dan misi, analisis SWOT, perumusan alternatif strategi, hingga penentuan program prioritas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka kerja praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam upaya kolektif mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Mandalahayu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Penanggulangan Kemiskinan, Desa Mandalahayu, Efektivitas Program, Pembangunan Pedesaan.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target ambisius mencapai 0% pada tahun 2024. Komitmen ini bukan hanya retorika, melainkan dibangun di atas fondasi tiga pilar utama: komitmen pemerintah, konvergensi program, anggaran, dan sasaran, serta pemantauan dan evaluasi. Pilar pertama, komitmen pemerintah, termanifestasi melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024 yang memuat program dan kegiatan pendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penetapan regulasi dan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

wilayah prioritas. Adanya komitmen ini menjadi landasan kuat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk bergerak serempak menuju tujuan yang sama.

Pilar kedua, konvergensi program, anggaran, dan sasaran, merupakan jantung dari strategi ini. Ini melibatkan koordinasi intensif baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, langkah-langkahnya meliputi penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengalokasian APBN yang berpihak pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemutakhiran data sasaran, serta mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah juga memastikan program-program ini memberikan afirmasi khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan. Sementara itu, di tingkat daerah, konvergensi diwujudkan melalui dukungan terhadap program nasional, inovasi program daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kemitraan dengan sektor non-pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Kartasmita (1996), strategi pembangunan dan pengentasan kemiskinan harus melibatkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan. Senada dengan itu, Suharto (2009) menekankan pentingnya kebijakan sosial yang komprehensif dan strategi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga diimplementasikan melalui tiga strategi utama: penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi penurunan beban pengeluaran dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial reguler (seperti PKH dan Kartu Sembako) dan khusus (seperti BLT DD), serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan rehabilitasi sosial. Ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial langsung yang dialami oleh masyarakat miskin ekstrem. Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan masyarakat berfokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan, mencakup peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan akses terhadap aset produktif dan modal, pendampingan kewirausahaan, serta pengembangan usaha ultra mikro dan mikro. Bersamaan dengan itu, strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, serta peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan.

Untuk memastikan konvergensi program berjalan efektif, terdapat prasyarat penting yang harus dipenuhi, meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyediaan data penerima target yang mutakhir dan akurat melalui Registrasi Sosial Ekonomi, serta konvergensi program lintas kementerian/lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya. Konvergensi



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

juga didorong berdasarkan kebutuhan penduduk, memastikan bahwa bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar diberikan secara tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan layanan terstandarisasi, inklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta penetapan prosedur percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui regulasi yang jelas juga menjadi kunci. Rahayu (2015) mengemukakan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam merumuskan perencanaan strategis yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam hal struktur kelembagaan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dikoordinasikan oleh Wakil Presiden di tingkat pusat, didukung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di tingkat daerah. Di tingkat desa/kelurahan, perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan aparatur desa dan masyarakat. Sumber pendanaan berasal dari tiga alur utama: APBN, APBD, serta sumber pendanaan non-pemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR), filantropi, dan dana zakat. Koordinasi yang baik antara berbagai sumber pendanaan ini sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryson (2007) yang menekankan bahwa perencanaan strategis bagi organisasi sosial, termasuk pemerintah desa, memerlukan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Pengurangan tingkat kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan hingga 6-7% pada akhir tahun 2024. Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023 menargetkan persentase penduduk miskin antara 5,42-5,77% pada tahun 2023. Di tingkat daerah, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025. Fase keempat RPJPD ini memprioritaskan terwujudnya masyarakat Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan penekanan pada struktur perekonomian yang kokoh, didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kondisi umum Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui empat aspek utama: geografi dan demografi, kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan, yang diuraikan menjadi tiga area:



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan aktivitas seni budaya serta olahraga. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diukur menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Gini (Gini Ratio). Aspek Kesejahteraan Sosial difokuskan pada indikator kemiskinan, meliputi garis kemiskinan, angka kemiskinan, serta indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Karakteristik kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan, seringkali bekerja di sektor pertanian dengan upah rendah. Pandangan mengenai penyebab kemiskinan, terutama di perdesaan, terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pandangan ekonomi politik mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Sementara itu, kelompok pandangan ekologi melihat kemiskinan sebagai akibat dari tekanan penduduk yang tidak terkendali terhadap sumber daya dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan lebih banyak sumber daya keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dan menangani masalah kemiskinan yang bersifat daerah spesifik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, di mana penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan ini merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan (setara 2100 kilo kalori per kapita per hari dari 52 jenis komoditas) dan bukan makanan (51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 di perdesaan). Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang penting adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2). P1 mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Penurunan kedua indeks ini di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Data terpadu seperti hasil Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) terus diperbarui dan dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk mengintegrasikan data penerima bantuan dan program sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada Tahun 2021, Kementerian Sosial



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tabel 1.1 menunjukkan Data DTKS Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, yang mencakup jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, penerima PKH, Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di setiap desa.

Pemerintah Indonesia mengkategorikan tingkat kemiskinan berdasarkan Desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana diatur dalam SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020. Desil 1 mewakili 10% rumah tangga termiskin (sangat miskin), Desil 2 mencakup 10-20% rumah tangga termiskin (miskin), Desil 3 adalah kelompok 20-30% rumah tangga termiskin (hampir miskin), dan Desil 4 merupakan 30-40% rumah tangga termiskin (rentan miskin). Rumah tangga yang termasuk dalam Desil >4 digolongkan sebagai kondisi mampu hingga sangat mampu.

Desa Mandalahayu, salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki luas wilayah 1114,760 hektar dengan mayoritas lahan digunakan untuk perkebunan, tegalan, dan sawah. Jumlah penduduk mencapai 4.513 jiwa dengan 1.225 Kepala Keluarga (KK), di mana 764 KK tergolong miskin. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan, hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu.

Permasalahan yang teridentifikasi antara lain: (1) Pelaksanaan program bantuan dari pemerintah belum efektif, terutama dalam penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana masih ada keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara ada keluarga yang lebih mampu justru menerimanya; (2) Inisiatif kerja sama masih kurang, karena Pemerintah Desa Mandalahayu belum pernah menjalin kerja sama formal dengan NGO lokal atau nasional; (3) Partisipasi masyarakat masih kurang, terlihat dari rendahnya kehadiran kelompok rentan dalam Musrenbangdes, sehingga aspirasi dan kebutuhan riil mereka tidak terakomodir; dan (4) Laporan realisasi program penanggulangan kemiskinan menunjukkan banyak perbedaan signifikan antara rencana dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada Perencanaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Tujuannya adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis

dalam pengembangan model strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan dan manfaat praktis bagi Pemerintah Desa Mandalahayu dalam menyusun perencanaan yang lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Perencanaan strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, akan dianalisis secara mendalam melalui studi literatur. Pendekatan ini esensial karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai konsep, teori, model, serta praktik terbaik yang relevan dengan perencanaan strategis dan penanggulangan kemiskinan. Dengan menelusuri literatur yang ada, penelitian dapat membangun kerangka teoretis yang kuat, memahami faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Studi literatur juga membantu dalam membandingkan kondisi Desa Mandalahayu dengan kasus-kasus serupa di lokasi lain, memberikan perspektif yang lebih luas untuk merumuskan rekomendasi yang kontekstual dan efektif.

Melalui studi literatur, penelitian ini akan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya. Data yang terkumpul akan diinterpretasikan untuk memahami bagaimana perencanaan strategis telah diterapkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan, khususnya di tingkat desa. Hal ini mencakup pemahaman tentang proses penyusunan strategi, implementasi program, serta evaluasi dampaknya. Dengan demikian, studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci, membangun hipotesis, dan merancang metodologi penelitian yang tepat untuk menganalisis perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, pembahasan hasil penelitian ini akan menguraikan bagaimana perencanaan strategis dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Desa Mandalahayu. Perencanaan strategis, sebagaimana dijelaskan oleh J. Pearce II & Richard B. Robinson (2014), melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, ini berarti merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas, serta mengidentifikasi strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil penelitian mengkonfirmasi empat permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu, yang telah diuraikan dalam latar belakang:

- **Ketidaktepatan Sasaran Bantuan:** Data di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara daftar penerima bantuan (PKH, BPNT) dengan kondisi ekonomi riil masyarakat. Banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara keluarga yang lebih mampu justru terdaftar. Hal ini mengindikasikan kelemahan dalam sistem pemutakhiran data atau verifikasi penerima manfaat.
- **Kurangnya Inisiatif Kerja Sama:** Pemerintah Desa Mandalahayu belum secara aktif menjalin kemitraan formal dengan organisasi non-pemerintah (NGO) lokal maupun nasional yang memiliki fokus pada isu kemiskinan. Padahal, kolaborasi dengan NGO dapat memperluas jangkauan program, membawa keahlian tambahan, dan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan.
- **Rendahnya Partisipasi Masyarakat:** Tingkat kehadiran masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat rendah. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan spesifik dari kelompok termiskin tidak terakomodasi dengan baik dalam perencanaan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Abe (2005) yang menekankan pentingnya perencanaan daerah partisipatif agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Disparitas antara Rencana dan Realisasi Program:** Ditemukan perbedaan signifikan antara program yang tertuang dalam dokumen RKPDes dengan implementasi di lapangan. Program pelatihan keterampilan yang direncanakan tidak terealisasi, atau alokasi dana dialihkan untuk kegiatan lain. Ini menunjukkan kelemahan dalam tahap implementasi, pengawasan, dan evaluasi program.

Penerapan Perencanaan Strategis

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan pendekatan perencanaan strategis yang komprehensif. Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (1998) dalam "Strategy Safari" mengemukakan berbagai mazhab strategi, namun intinya adalah bagaimana organisasi merumuskan dan melaksanakan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

strateginya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses perencanaan strategis di Desa Mandalahayu harus mencakup langkah-langkah berikut:

a. Penetapan Visi dan Misi

Visi penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu harus jelas dan terukur, misalnya "Terwujudnya Masyarakat Desa Mandalahayu yang Mandiri dan Sejahtera Tanpa Kemiskinan Ekstrem pada Tahun X". Misi kemudian akan menguraikan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut, seperti:

- Meningkatkan akurasi data kemiskinan dan memastikan tepat sasaran bantuan.
- Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.
- Memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Analisis Situasi (SWOT)

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan instrumen penting untuk memahami kondisi internal dan eksternal Desa Mandalahayu dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

- Kekuatan (Strengths): Potensi sumber daya alam yang melimpah (lahan pertanian, perkebunan), angkatan kerja produktif yang besar, dan ketaatan masyarakat pada nilai-nilai luhur serta partisipasi yang tinggi dalam pengawalan pembangunan (walaupun rendah dalam Musrenbangdes).
- Kelemahan (Weaknesses): Ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya inisiatif kerja sama formal dengan NGO, rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbangdes, dan disparitas antara rencana dan realisasi program. Juga, masih banyak pengangguran atau masyarakat dengan penghasilan tidak tetap, serta kebutuhan akan peningkatan fasilitas kerja dan SDM pemerintahan desa.
- Peluang (Opportunities): Komitmen pemerintah pusat dan daerah (RPJMN, RPJMD, RPJPD) dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, adanya regulasi pendukung (SK Mensos tentang DTKS), ketersediaan sumber pendanaan dari berbagai alur (APBN, APBD, CSR, Filantropi), serta keberadaan NGO di wilayah Tasikmalaya yang dapat diajak bekerja sama.

- Ancaman (Threats): Dampak krisis ekonomi multi-dimensi, fluktuasi harga komoditas pertanian, serta potensi data yang tidak akurat jika tidak terus diperbarui.

Perumusan Alternatif Strategi

Berdasarkan analisis SWOT, beberapa alternatif strategi dapat dirumuskan:

- Strategi Konsolidasi Data dan Verifikasi Lapangan: Melakukan pemutakhiran data DTKS secara berkala dan verifikasi lapangan yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ini sejalan dengan pentingnya data akurat yang ditekankan oleh Haines (2000) dalam pendekatan system thinking untuk perencanaan strategis.
- Strategi Kemitraan Multi-Pihak: Menginisiasi dan melembagakan kerja sama formal dengan NGO, sektor swasta (CSR), dan lembaga filantropi untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan program.
- Strategi Pemberdayaan Partisipasi Inklusif: Mengembangkan metode partisipatif yang lebih inovatif dan menjangkau kelompok rentan (misalnya, Musrenbangdes tematik, forum diskusi khusus kelompok perempuan atau disabilitas) untuk menjamin aspirasi mereka terakomodir.
- Strategi Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev): Membangun sistem monev yang kuat dan transparan, termasuk pelaporan realisasi program secara berkala dan audit internal, untuk memastikan keselarasan antara rencana dan implementasi. Ini didukung oleh pandangan Mahmudi (2005) tentang pentingnya manajemen kinerja sektor publik.
- Strategi Peningkatan Kapasitas Ekonomi Lokal: Mengembangkan program pelatihan vokasi dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan potensi lokal (pertanian, perkebunan), serta memfasilitasi akses modal dan pasar bagi UMKM desa.

Penentuan Program dan Kegiatan Prioritas

Dari alternatif strategi, dipilih program dan kegiatan yang paling prioritas, misalnya:

1. Program Pemutakhiran dan Validasi Data DTKS Berkelanjutan: Dengan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
2. Pembentukan Tim Kemitraan Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan: Bertugas mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

3. Pelaksanaan Musrenbangdes Partisipatif Inklusif: Dengan sosialisasi yang masif dan fasilitasi khusus untuk kelompok rentan.
4. Sistem Pelaporan Realisasi Program Transparan: Menggunakan papan informasi desa atau media digital untuk publikasi realisasi program dan anggaran.
5. Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal: Misalnya, pelatihan pengolahan hasil pertanian, budidaya ikan, atau kerajinan tangan, dengan pendampingan hingga pemasaran.

Implementasi dan Tantangan

Implementasi perencanaan strategis ini memerlukan dukungan kuat dari seluruh elemen pemerintahan desa dan masyarakat. Taufiqurokhman (2008) menegaskan bahwa konsep dan kajian ilmu perencanaan adalah fundamental untuk mencapai tujuan pembangunan. Tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah perubahan data kemiskinan yang dinamis, resistensi terhadap perubahan dalam proses birokrasi, serta memastikan keberlanjutan pendanaan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik, hambatan tersebut dapat diatasi. Ketersediaan data DTKS dari SIKS-NG adalah kekuatan yang signifikan, asalkan terus diperbarui dan dimanfaatkan secara optimal.

D. Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi tantangan serius yang menghambat efektivitas program. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya inisiatif kerja sama dengan pihak eksternal, rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta disparitas antara perencanaan dan realisasi program. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan strategis adalah kunci untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan di Desa Mandalahayu. Dengan merumuskan visi dan misi yang jelas, melakukan analisis SWOT yang mendalam, mengembangkan alternatif strategi, dan menetapkan program prioritas yang relevan, Desa Mandalahayu dapat membangun kerangka kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi-strategi yang diusulkan, seperti konsolidasi data, kemitraan multi-pihak, pemberdayaan partisipasi inklusif, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas ekonomi lokal, diharapkan dapat mengatasi akar permasalahan yang ada.

Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan strategis ini sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi. Dengan implementasi yang disiplin dan evaluasi yang berkelanjutan, Desa Mandalahayu memiliki potensi besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, sejalan dengan target nasional dan daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Daftar Pustaka

- A.Pearce, II, J., & Richard B.Robinson, J. (2014). *Manajemen Strategi*. Salemba Empat.
- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pembaharuan.
- Anang Firmansyah, B. M. (2018). *Pengantar Manajemen*. CV Budi Utama.
- Bryson, J. (2007). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Belajar Offset.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2006). *Manajemen Strategis*. Salemba Empat.
- Effendi, U. (2012). *Asas Manajemen*. Rajawali Pers.
- Haines, S. G. (2000). *The System Thinking Approach to Strategic Planning and Management*. St. Lucie Press.
- Handoko, H. T. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. BPFE Yogyakarta.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Hunger, J. D., & L.Wheelen, T. (2012). *Manajemen Strategis*. Andi.
- Kartasasmita, G. (1996). *Strategi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Miles, M. B. & A. M. H. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ovalhanif. (2009). *Strategic Planning*. PT. Pustaka LP3ES.
- Rahayu, T. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perencanaan Strategis*.

- Ramli, H. M. (2014). Manajemen Strategik Sektor Publik. Alauddin University.
- Safroni, L. (2012). Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Adutya Media Publishing.
- Siagian, S. P. (2006). Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi. Gunung Agung.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). Kebijakan Sosial dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.
- Taufiqurokhman. (2008). KONSEP DAN KAJIAN ILMU PERENCANAAN. FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Terry, G. (2014). Dasar-Dasar Manajemen. Bina Aksara.
- Peraturan/Dokumen: Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.